**BAB IV**

**ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

**A. LAZ Harapan Duafa (HARFA)**

**1. Sejarah LAZ HARFA**

Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (LAZ HARFA) berdiri pada tanggal 25 September tahun 2014 sebagai fusi dari empat LAZ yag berada di tingkat kabupaten dan kota, yaitu LAZ Harapan Umat (HaRum) dan Lembaga Yatim Dhuafa (Latifa) yang berkantor di kabupaten serang, LAZ Dompet Amanah Amal Insani (DAAI) yang berkantor di kota Cilegon dan LAZ Amal Sejahtera yang berkantor di kabupaten Tangerang. Semua LAZ di atas difusikan disebabkan karena LAZ yang diakui pemerintah hanya ada di tingkat provinsi dan pusat.[[1]](#footnote-1)

Empat LAZ tersebut beryayasan dan telah mendapatkan izin dan legalitas dari walikota dan bupati, dibentuk oleh para aktivis dan pemerhati ekonomi Islam dari berbagai organisasi dan perguruan tinggi, seperti PII, ICMI, dan IAIN dalam rangka menyambut Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 1999 yang terbit pada era kepresidenan BJ. Habibi. Di samping mereka juga melihat LAZ-LAZ baru ada di tingkat nasional, seperti LAZ Dompet Dhuafa, Harapan Kita, tapi untuk tingkat regional belum ada, hingga munculah inisiatif dari mereka untuk membentuk LAZ tingkat regional.[[2]](#footnote-2)

Tahun 2003 terbitlah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pasal 22 undang-udang tersebut, dijelaskan kriteria dan persyaratan pendirian LAZ. Pasal tersebut hanya mengakomodir dan menjelaskan LAZ yang bisa dikukuhkan oleh pemerintah hanya ada di dua tingkatan saja, tingkat pusat dan tingkat provinsi[[3]](#footnote-3), sehingga keberadaan Empat LAZ yang berada di tingkat kabupaten tidak bisa dikukuhkan oleh pemerintah. Dengan demikian para aktivis dari 4 LAZ di atas berinisiatif untuk menggabungkan diri satu sama lain, hingga akhir 2004 september lahirlah LAZ Harfa[[4]](#footnote-4).

LAZ-LAZ tersebut menyepakati nama HARFA, karena mereka ingin fokus dan concern dengan kaum dhuafa yang di dalamnya include anak-anak yatim. Kantor pusatnya di Ciceri, Serang, yang dahulunya kantor LAZ Harapan Umat (HARUM), sedangkan kantor-kantor yang ada di Cilegon dan Tangerang menjadi kantor cabang HARFA[[5]](#footnote-5)

Akhir Desember 2004 terjadi Tsunami di Aceh, HARFA yang baru terbentuk langsung menggalang dana besar-besaran, mengumpulkan sumbangan pakaian-pakaian yang masih layak pakai, lalu januari 2005 HARFA memberangkatkan tim medis, mengirimkan pakaian layak pakai, logistik, obat-obatan dan sebagainya, bekerja sama dengan korem. Saat itu satu-satunya lembaga yang menggaung mengadakan penggalangan dana dan bantuan di Provinsi Banten hanya HARFA[[6]](#footnote-6).

Operasional terus berjalan, program-program aksi peduli cerdas, aksi peduli sehat, aksi peduli ekonomi, aksi peduli social dan aksi peduli kemanusiaan juga terus dijalankan. Undang-undang zakat terus berkembang dan mengalami revisi. LAZ Harfa secara yayasan sudah legal, tapi secara kelembagaan, LAZ Harfa belum mendapatkan rekomendasi dari gubernur, pada tahun 2008 para aktivis mengajukan permohonan izin dan legalitas dari kementrian agama provinsi dan gubernur, tetapi mereka tidak langsung memberikan rekomendasi, karena menunggu undang-undang zakat yang sedang direvisi. Turunlah kemudian Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011, tapi belum juga bisa dikeluarkan rekomendasi, karena harus menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Agama[[7]](#footnote-7).

Undang-undang Zakat No. 23 tahun 2011 mengharuskan lembaga zakat sebagai bagian dari organisasi kemasyarakatan atau lembaga berbadan hukum[[8]](#footnote-8), maka pada tanggal 27 Februari 2012 disahkan Akta pendidirian Yayasan Harapan Dhuafa Banten dengan Surat Keterangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU - 1799.AH.01.04Tahun 2012Tentang Pengesahan Yayasan Harapan Dhuafa Banten sebagai payung Hukum bagi LAZ HARFA Banten. Maka berdasarkan akte tersebut, didirikanlah Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa ( LAZ HARFA)[[9]](#footnote-9).

LAZ HARFA kemudian diresmikan pada tahun 2016 dengan surat keputusan Dirjen BIMAS Kementrian Agama RI: DJ.III/651 Tahun 2016.[[10]](#footnote-10)

HARFA menghimpun dana sosial dari individu atau korporasi, berupa zakat, infak, sedekah, atau bantuan kemanusiaan lainnya untuk didayagunakan dan disalurkan kepada yang berhak, yakni fakir miskin dan orang-orang yang terlantar sesuai perintah Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Ma’un dan amanat konstitusi, UUD 1945 pasal 27. Selain berupa bantuan langsung tunai yang bersifat konsumtif, dana sosial disalurkan melalui program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.[[11]](#footnote-11)

**2. Legalitas LAZ HARFA**

Pembentukan Lembaga Amil Zakat sebagaimana yang diatur dalam pasal (18) ayat (1) Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 wajib mendapat izin dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Izin yang dimaksud dalam UU ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit[[12]](#footnote-12) :

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.
2. Berbentuk lembaga berbadan hukum
3. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
4. Memiliki pengawas syariat.
5. Memiliki kemampuan teknis, administrative, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
6. Bersifat nirlaba.
7. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat.
8. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Mekanisme perizinan lebih jauh dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah pasal (58) ayat (1) dan (2). Pada ayat (1) dijelaskan, bahwa pembentukan LAZ dilakukan dilakukan dengan permohonan tertulis. Permohonan tertulis sebagaimana dijelaskan dalam ayat (2) diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dengan melampirkan hal-hal berikut ini[[13]](#footnote-13) :

1. Anggaran dasar organisasi
2. Surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
3. Surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
4. Surat rekomendasi dari BAZNAS.
5. Susunan dan pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat
6. Surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala; dan
7. Program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

Surat keterangan terdaftar dalam poin b dibuktikan dengan Akte Notaris : HM. Islamsyah Arifin, SH No. 27 Tanggal 27 Februari 2012. Kemenkeu : PEM-0003745ER/WJP.08/KP.0103/2012. Kesbangpol : 220 – 12 – 08/0017/VII/2012. Dinsos : 466/705/LKS/ DINSOS/ 2015. Dan surat pengesahan sebagai badan hukum dari kementrian Hukum dan HAM sebagaimana poin c dibuktikan dengan surat pengesahan dari Kemenkumham: AHU–1799.AH.01.04.Tahun 2012

Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala provinsi diberikan oleh direktur jendral yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama[[14]](#footnote-14).

Setelah proses pengajuan tertulis dan memenuhi syarat maka terbitlah izin pembentukan LAZ dari Kemenag RI. Dirjen Bimas Islam Kemenag RI: DJ.III/651 Tahun 2016

**3. Visi dan Misi LAZ HARFA**

Visi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti, *pertama.* Kemampuan melihat pada inti persoalan. *Kedua,* pandangan atau wawasan ke depan. *Ketiga*, kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. *Keempat*. Apa yang tampak di khayalan. *Kelima,* penglihatan, pengamatan. Dari beberapa arti tersebut, arti yang sesuai dalam konteks kelembagaan adalah arti yang kedua yakni pandangan atau wawasan ke depan. Sedangkan misi adalah tugas yang dirasakan oleh orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya demi agama, ideology, patriotism dan sebagainya.

Visi LAZ HARFA adalah menjadi lembaga terpercaya dalam pemberdayaan dhuafa. Sedangkan misinya sebagai berikut [[15]](#footnote-15):

1. Membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap dhuafa
2. Mengelola zakat, infak, sedekah, wakaf dan fidyah (ZISWAF) dan dana lainnya untu peningkatan kesejahteraan.
3. Membangun potensi masyarakat melalui kemitraan dengan perusahaan, pemerintah dan NGO *(Non Government Organization)*

**4. PROGRAM LAZ HARFA**

Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (LAZ HARFA) memiliki tiga jenis program, yang saling kait-mengait antara satu jenis program dengan jenis program lain. Jenis-jenis program tersebut adalah, Tiga Pilar program, Program Pemberdayaan ZIS, dan program kemitraan dan kerjasama.

1. **Tiga Pilar Program**

HARFA memiliki tiga pilar program utama, yang dijadikan acuan pelaksanaan program-program derivatifnya, tiga pilar tersebut adalah Edukasi, Advokasi, Rehabilitasi dan *Recovery.*

1. Edukasi

Pilar Edukasi diwujudkan melalui sosialiasai zakat, infaq, sedekah, wakaf dan fidiyah (ZISWAF) melalui berbagai media, salah satunya adalah khutbah jumat[[16]](#footnote-16). Dan diwujudkan melalui kegiatan peningkatan kefahaman nilai agama.

1. Advokasi

Pilar Advokasi diwujudkan melalui Pengelolaan pendidikan dasar, menengah, keterampilan (*life skill*) serta pendidikan alternatif berbasis komunitas, Peningkatan mutu kesehatan masyarakat dan lingkungan. Dan Pendampingan kemandirian ekonomi masyarakat Dhuafa.

1. Rehabilitasi dan Recovery

Pilar rehabilitasi dan *recovery* diwujudkan dengan menyalurkan bantuan solidaritas kemanusiaan, normalisasi kehidupan masyarakat akibat bencana, Pengadaan sarana dan prasarana bagi korban bencana serta meningkatkan kepedulian dalam mengentaskan permasalahan umat.

1. **Program Pemberdayaan ZIS LAZ HARFA[[17]](#footnote-17)**

Program pemberdayaan ZIS Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (LAZ HARFA) diwujudkan dalam bentuk aksi-aksi kongkrit yang manfaatnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Aksi-aksi tersebut adalah, aksi peduli cerdas, aksi peduli sehat, aksi peduli ekonomi, dan aksi peduli kemanusiaan.

* 1. Aksi Peduli Cerdas

Di bidang pendidikan, LAZ HARFA menyelenggarakan pendidikan kesetaraan yang diberi nama Sekolah Harapandengan izin Dinas Pendidikan berupa PKBM. Sekolah yang bertempat di Jombang, Kota Cilegon ini membina anak-anak jalanan agar produktif dan bekerja secara layak serta berhenti mengais rizki di jalanan. Kemudian LAZ HARFA mengratiskan Sekolah sebagai solusi bagi siswi yatim dan dhuafa yang tidak memiliki biaya untuk melanjutkan ke jenjang SMP atau SMA. Program ini bekerja sama dengan Khadijah Islamic Boarding School (KIS) Jakarta .

HARFA juga memberikan Beasiswa Prestasi Yatim dan Dhuafa sebagai motivasi dan empati kepada mereka untuk terus meningkatkan kemampuan akademiknya. Tidak hanya yang masih sekolah, masyarakat usia produktif yang sudah putus sekolah diberikan *skill* (keterampilan) menjahit melalui program kursus menjahit gratis di LKP *Harfa Skill Center* (HSC) agar dapat bekerja di dunia industri atau berwirausaha secara mandiri.

HARFA juga memiliki program Santunan Guru Ngaji Kampung sebagai *mustahiq fii sabilillah*. Mereka diberikan bantuan mengingat tidak adanya gaji atau upah tetap yang diterima dari aktivitas yang keagamaan yang dilakukan. Selanjutnya, dari tanah dana wakaf tunai LAZ HARFA akan mendirikan Pondok Generasi Harapan untuk membina anak-anak yatim dan dhuafa dengan berbasiskan tahfidz Al-Qur’an dan entrepreneur.

* 1. Aksi Pedulis Sehat

Sebagai lembaga sosial kemanusiaan yang peduli terhadap kesehatan, LAZ HARFA Banten tetap focus pada Aksi Peduli Kesehatan. Aksi yang sudah dilakukan yaitu advokasi kesehatan dengan mendampingi pasien tidak mampu selama dirawat di rumah sakit, khusus untuk pasien gizi buruk pendampingan dilakukan sampai pasien sehat dengan asupan gizi terpenuhi. Kemudian kegiatan Pos Layanan Kesehatan Gratis untuk masyarakat yang diselenggarakan secara rutin tiap Ahad pagi di tempat-tempat keramaian.

HARFA juga mengadakan kegiatan khitanan massal setiap liburan sekolah untuk melayani anak-anak dhuafa yang belum di khitan, sedangkan untuk orang tuanya dilayani dengan pemeriksaan sekaligus pengobatan massal.

Di lokasi yang belum terlayani kesehatannya, seperti desa-desa yang ada di Kabupaten Pandeglang dan Lebak tidak luput dari perhatian LAZ HARFA. Masyarakat dapat merasakan manfaat dari aksi peduli sehat LAZ HARFA melalui program Kesehatan Lingkungan, Bantuan Sarana Air Bersih (SAB), Promosi Kesehatan (Promkes) seperti Hygine, Nutrisi, dan Cuci Tangan Pakai Sabun, *Community Lead Total Sanitation* (CLTS) yang fokus dengan pembuatan jamban tanpa subsidi, dan Sekolah Hijau Sehat untuk mewujudkan sekolah yang sejuk dan asri.

* 1. Aksi Peduli Ekonomi

Di bidang ekonomi, LAZ HARFA memberikan Bantuan Dana Bergulir kepada masyarakat yang membutuhkan modal untuk usaha dengan sistem *Qordul Hasan* yaitu pengembalian atau cicilan tanpa bunga. LAZ HARFA juga melakukan pembinaan Kelompok Ekonomi Mikro dan Koperasi Keuangan Mikro Berbasis Perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha, kerja keras, dan kreativitasnya sendiri sehingga mampu berdaya secara mandiri.

Program Ternak Berkah dan Tani Berkah yang direalisasikan di Kabupaten Pandeglang juga memberikan pengaruh yang besar terhadap wawasan dan pendapatan masyarakat yang sebelumnya awam, sehingga dapat beralih dari cara konvensional ke cara yang lebih efektif serta efisien dalam berternak dan bertani.

* 1. Aksi Peduli Ekonomi

Aksi peduli sosial berupa program *Kafalah* Yatim yaitu bantuan penuh untuk anak yatim piatu dijadikan sebagai anak asuh LAZ HARFA. Kemudian program Sentuhan Hati Mualaf yaitu bantuan produktif sesuai kondisi yang dibutuhkan oleh mualaf yang hidup sebatang kara dan terasingkan dari keluarganya agar mereka tetap *istiqomah* dalam memeluk agama Islam.

Di Kabupaten Pandeglang, terdapat program bantuan kaki palsu untuk masyarakat difabel yang dilanjutkan dengan program pendampingan dan pemberdayaan difabel. Selain itu ada program Desiminasi Perlindungan Anak dan Kesetaraan Gender. Program Aksi Peduli Sosial lainnya adalah kegiatan Tebar Qurban dan Aqiqah di kampung dhuafa binaan LAZ HARFA.

* 1. Aksi Peduli Kemanusiaan

Aksi peduli kemanusiaan yang dilakukan LAZ HARFA yaitu program Tanggap Darurat Bencana. Masyarakat yang terkenah musibah banjir, gempa, tsunami, longsor, erupsi, kebakaran, kekeringan korban peperangan perlu bantuan segera khususnya penanganan darurat dan cepat untuk menyelamatkan jiwa dan harta mereka.

Dalam aksi konkritnya LAZ HARFA bekerjasama dengan lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya ikut terlibat dalam membantu korban banjir Ciujung Serang, Ciberang Pandeglang, Cimanceuri Tangerang dan Situ Gintung Tangsel. Kemudian membantu korban tsunami Aceh, Gempa Jogja, dan erupsi Gunung Merapi. Adapun bantuan yang diberikan berupa makanan siap saji, sembako, pakaian, layanan kesehatan, dan pemulihan anak-anak korban bencana. Selanjutnya menyalurkan bantuan air bersih untuk korban kekeringan di Serang Utara (Kasemen sampai Tanara).

Aksi Pedulia Kemanusian LAZ HARFA tidak hanya di Banten dan Indonesia, namun sampai juga ke Dunia Islam yang dilanda bencana dan peperangan seperti Palestina, Rhingya, Mesir, Filipina, Afrika dan lain sebagainya.

1. **Program Kemitraan LAZ HARFA**

LAZ HARFA membangun kerjasama dan kemitraan dengan lembaga, organisasi swasta dan pemerintah untuk merealisasikan program-programnya. Program kemitraan dan kerjasama yang sudah dan masih dilakukan hingga saat ini adalah sebagai berikut :

* 1. Kerjasama dengan Caritas Australia dan AUSAID Program CLTS di 11 Desa dari 5 Kecamatan di Kabupaten Pandeglang, tahun 2007 sampai sekarang
  2. Kerjasama dengan Universitas Indonesia Program Bank Sampah, tahun 2016
  3. Penyaluran Qurban dengan PKPU, RZ, ACT ;setiap tahun
  4. Tanggap darurat bencana banjir dengan RZ, ACT, PKPU, BSMI, DD setiap tahun
  5. Kerjasama dengan KUIS (Koalisi Untuk Indonesia Sehat) Program Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial Pada Program TBC di 10 Kecamatan di Kabupaten Pandeglang, tahun 2005
  6. Kerjasama dengan KUIS program Kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun, tahun 2006
  7. Kerjasama dengan PCI (Project Concern International) Program CLTS di 3 Kecamatan di Kabupaten Pandeglang, tahun 2005 - f2007
  8. Kerjasama dengan Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan, Bappeda menyusun buku putih sanitasi, tahun 2015
  9. Kerjasama dengan Dare Foundation program pemberian alat bantu gerak untuk difabel, tahun 2013 &2016
  10. Kerjasama dengan Lazis PLN bantuan sarana air bersih, tahun 2016
  11. Kerjasama dengan Laznas BSM bedah rumah dan Sarana Air Bersih, tahun 2015
  12. Kerjasama dengan BPZIS Mandiri kerjasama Bakti sosial Tahun 2013 sd. sekarang
  13. Kerjasama dengan Komunitas Al – Ikhlas Tangerang Pimpinan Bapak Nasuha dan PT. Panca Pastika Mandiri. Kerjasama bantuan Pembangunan Madrasah Diniah Pasirkadu 2016
  14. Kerjasama dengan Komunitas Al – Ikhlas Tangerang Pimpinan Bapak Nasuha dan PT. Panca Pastika Mandiri. Kerjasama Bakti sosial, santunan Yatim dan Dhuafa, Bantuan Bencana Banjir di Desa Pairloa, Desa Waringinjaya, Desa Pasirkadu Tahun 2013 sd. Sekarang[[18]](#footnote-18)

**5. Desa Kertaraharja**

Seluruh desa yang didampingi HARFA selama sepuluh tahun terakhir berjumlah 34 desa, 25 desa sudah di *Passing Out,* karena dianggap sudah memenuhi indikator perkembangan terutama dalam bidang kesehatan dan 9 desa masih dalam binaan HARFA. Namun desa-desa yang sudah di *passing-out* bukan berarti dilepas sama sekali, dalam jangka waktu tertentu desa-desa tersebut akan dikunjungi oleh fasilitator untuk mengecek *sustainable* nya terutama program-program pemberdayaan ekonomi[[19]](#footnote-19). Desa-desa yang masih berada dalam dampingan HARFA tahun ini hingga tiga tahun mendatang adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kabupaten** | **Kecamatan** | **Desa** | **Kampung** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Pandeglang | Sindangresmi | Ciodeng | Ciodeng Barat |
| 2 |  |  |  | Cipahul |
| 3 |  |  | Bojongmanik | Babakan |
| 4 |  |  |  | Gayong |
| 5 |  | Sobang | Kutamekar | Sukarendah |
| 6 |  |  |  | Nasyid |
| 7 |  |  |  | Bulakan |
| 8 |  |  | Kertaraharja | Depok 1 |
| 9 |  |  |  | Depok 2 |
| 10 |  |  |  | Bahbul |
| 11 |  | Cigeulis | Sinar Jaya | Cibodas |
| 12 |  |  |  | Montor |
| 13 |  |  |  | Jaura |
| 14 |  |  | Waringin Jaya | Cimandahan |
| 15 |  |  |  | Rorah Sabin |
| 16 |  | Cibaliung | Sudimanik | Cimuncang |
| 17 |  |  | Sorongan | Ciherang |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 |  |  |  | Cikadongdong |
| 19 |  |  | Curug | Cisuren Girang |
| 20 |  |  |  | Cisuren Hilir |
| 21 |  |  |  | Babakan Kembang |
|  | **TOTAL** | **5 Kecamatan** | **9 Desa** | **21 Kampung** |

Sumber: Laporan Tahunan LAZ HARFA Pandeglang 2017

Desa Kertaraharja berada di kecamatan Sobang, kabupaten Pandeglang, Desa ini terdiri atas sepuluh kampung, yaitu Depok 1, Depok 2, Bahbul, Sumur Waru, Cilongkrang, Pancal, Pilar, Cipeti, Pamatang Nangka dan Pamatang Angkat, dengan jumlah RT sebanyak 13 RT. Penduduk desa ini secara keseluruhan berjumlah 2.735.[[20]](#footnote-20)

Sebagian besar mata pencaharian penduduk desa Kertaraharja berada dalam sektor pertanian, Hal ini disebabkan karena luasnya lahan pertanian dan perkebunan, Sedangkan sisanya berada dalam sektor kepegawaian dan kewirausahaan. Agar lebih jelas di bawah ini akan dipaparkan keadaan ekonomi penduduk desa Kertaraharja menurut pencaharian, pendapatan dan pengeluaran

Keadaan ekonomi menurut mata pencaharian[[21]](#footnote-21) :

Petani : 936 Orang

PNS : 7 Orang

Wirausaha : 4 Orang

Keadaan Ekonomi menurut pendapatan[[22]](#footnote-22) :

Di bawah 500 ribu : 742 Orang

500 – 1.000.000 : 164 Orang

1.000.000 – 2.000.000 : 52 Orang

2.000.000 ke atas : 7 Orang

Keadaan Ekonomi menurut pengeluaran[[23]](#footnote-23) :

di bawah 500 ribu : 1 Orang

500 – 1.000.000 : 845 Orang

1.000.000 – 2.000.000 : -

2.000.000 ke atas : 67 Orang

Jumlah Hektar Lahan[[24]](#footnote-24) :

Lahan pertanian : 2.024.000 Ha.

Lahan perkebunan : 1.872.800 Ha

Berdasarkan data di atas, ada ketimpangan antara pendapatan dan pengeluaran masyarakat desa Kertaharja, dimana rata-rata masyarakatnya berpenghasilan di bawah 500 ribu, tetapi kebutuhan yang harus mereka tutupi rata-rata di atas 500 ribu. Ketimpangan tersebut paling parah terjadi pada tiga kampung, yaitu kampung Depok 1, kampung Depok 2 dan kampung Bahbul. Dimana masyakarat yang berpenghasilan di bawah 500 ribu berjumlah 312 warga dan yang berpengeluaran di atas 500 ribu sampai 1.000.000 berjumlah 320 warga.

Dalam bidang kesehatan, mayoritas penduduk desa Kertaharja tidak memiliki jamban di rumah masing-masing. Masyarakat yang paling banyak memiliki jamban di rumah ada di kampung Sumur Waru, sedangkan mayoritas masyarakat yang tidak mempunyai jamban di rumah, yaitu kampung Depok 1, Depok 2 dan Bahbul. Dari hasil survey pendataan juga diketahui banyak dari warga tiga kampung tersebut yang mengalami diare dan gatal-gatal, karena banyak dari mereka yang masih BABS (Buang Air Besar Sembarangan). Di samping itu, mayoritas mereka masih menggunakan tadah hujan sebagai sumber sarana air bersih mereka. Hal tersebut dapat lebih jauh dilihat dari data berikut ini[[25]](#footnote-25) :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA KAMPUNG** | **JUMLAH RUMAH** | **JUMLAH PENDUDUK** | **JAMBAN** | | | | **SARANA AIR BERSIH** | | | |
| **CUBLUK** | **SHARING** | **LEHER ANGSA** | **SISA** | **TADAH HUJAN** | **SUMUR GALI** | **SUMUR BOR** | **GRAVITASI / PERPIPAAN** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Depok 1 | 121 | 297 | 10 | 0 | 34 | 77 | 84 | 67 | 39 | 0 |
| 2 | Depok 2 | 116 | 318 | 72 | 2 | 37 | 5 | 72 | 19 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | Bahbul | 127 | 350 | 38 | 0 | 19 | 70 | 84 | 14 | 22 | 0 |

Sumber: Dokumen LAZ HARFA

Berdasarkan tingkat keparahan, baik dari sisi ekonomi dan kesehatan di atas, maka LAZ HARFA memilih tiga kampung tersebut untuk diintervensi. LAZ HARFA melalui fasilitator akan mendampingi desa tersebut selama 3 tahun. Pendampingan sudah berjalan sejak bulan juli 2017. Target yang ingin dicapai HARFA selain perubahan fisik dan infrastruktur, juga perubahan perilaku, sehingga terjadi ke-*sustain*-an, tidak berhenti berjalan setelah berhentinya masa pendampingan, tetapi terus menerus berjalan sampai kapanpun.

1. **Peran Strategis LAZ HARFA dalam Peningkatan Kesehatan dan Pemberdayaan Ekonomi.**

Peran strategis HARFA terhadap peningkatan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa tertinggal adalah sebagai pengatur pendistribuasian ZIS dalam bentuk upaya pengentasan kemiskinan. Dalam hal ini, terdapat ZIS yang didistribusikan secara langsung kepada masyarakat dan ada yang secara tidak langsung.

1. Distributor ZIS yang bersifat Langsung.

Usaha di bidang ekonomi, terutama pada masyarakat desa tertinggal sangat membutuhkan modal. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, modal didefinsikan sebagai uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, atau melepas uang (barang) yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.

Dana zakat, infak dan sedekah dijadikan sebagai modal untuk memberdayakan ekonomi masyarakat desa Kertaraharja. Hal ini dilakukan dengan pemberian modal ekonomi kepada kaum dhuafa untuk dikelola dan dikembangkan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan mereka. Dalam hal ini, HARFA memberikan modal 20 ekor kambing kepada kaum dhuafa desa Kertaharja, dengan prinsip bagi hasil. Dua tahun setelah program penghasilan mereka meningkat 40-50 % dari penghasilan mereka sebelumnya. HARFA juga memberikan bantuan modal awal kepada koperasi kecil mikro berbasis perempuan (KKMBP).

1. Distributor ZIS yang bersifat tidak langsung

Hasil dan perubahan perilaku masyarakat, baik di bidang kesehatan dan ekonomi tidak lepas dari peran sentral seorang fasilitator yang mendampingi mereka dari awal kegiatan sampai akhir. Fasilitator memainkan peran strategis dalam memicu masyarakat, mengadakan kegiatan untuk mereka, mengawal hingga pada akhirnya merubah perilaku mereka baik di bidang kesehatan ataupun ekonomi.

Dalam literatur pekerjaan sosial, fasilitator sering disebut sebagai pemungkin (*enabler*). Keduanya bahkan sering dipertukarkan satu sama lain. Barker seperti yang dikutip Suharto memberi definisi fasilitator sebagai tanggungjawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transnasional.[[26]](#footnote-26).

Metode yang digunakana fasilitator HARFA dalam menjalankan program di atas adalah pendampingan sosial, di mana fasilitator *live in* selama lima hari dalam seminggu, mengadakan kunjungan silaturrahmi dengan warga *door to door*, tiap hari sepuluh rumah, agar terbentuk hubungan emosional antara fasilitator dengan masyarakat.[[27]](#footnote-27)

Pendekatan yang digunakan fasilitator adalah pendekatan komunitas, dimana pengembangan masyarakat memfokuskan pada partisipasi masyarakat[[28]](#footnote-28). Terdapat beberapa kelebihan dalam implementasi pendekatan komunitas untuk pengembangan masyarakat, *pertama,* terdapat partisipasi masyarakat local dalam setiap proses pengambila keputusan dan tindakan. *Kedua,* membawa perubahan terhadap pemahaman yang didorong dan dibawa keluar oleh komunitas warga sendiri. *Ketiga,* meningkatkan kemampuan warga komunitas dengan melatih dan membentuk pengalaman dalam mengambil keputusan dan tindakan yang demokratis di tingkat lokal.[[29]](#footnote-29). dengan pendekatan komunitas, masyarakat merasa memiliki seluruh program dan yang direncanakan bersama fasilitator.[[30]](#footnote-30)

Dalam ilmu sosial, pendampingan sosial berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi yang dapat disingkat dalam akronim 4P, yakni, pemungkinan *(enabling)* atau fasilitasi, penguatan (*empowering),* perlindungan *(protecting),* dan pendukungan *(supporting)[[31]](#footnote-31)*

1. Pemungkinan atau fasilitasi merupakan fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat. Beberapa tugas pekerja sosial yang berkaitan dengan fungsi ini antara lain menjadi model (contoh), melakukan mediasi dan negosiasi, membangun konsensus bersama, serta melakukan manajemen sumber.[[32]](#footnote-32) Dalam hal ini, fasilitator HARFA memberikan motivasi kepada masyarakat agar mereka memiliki Jamban di rumah masing-masing atau paling tidak memiliki cubluk, sebagai dasar dari hidup sehat dan bersih.
2. Penguatan adalah fungsi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat *(capacity building).* Fasilitator sebagai pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan penguatan[[33]](#footnote-33). Dalam bidang ekonomi, fasilitator HARFA mengadakan latihan wajib mitra dalam KKM-BP (Koperasi Keuangan Mikro Berbasis Perempuan), para calon pengurus dan anggota KKMB dilatih hal-hal yang berkaitan dengan keadiministrasian, pengelolaan aset, *problem solving* dan sebagainya, sehingga para calon pengurus mengerti dasar-dasar administrasi dan pengelolaan koperasi, sedangkan para anggota memahami prosedur simpan pinjam dalam koperasi tersebut. sedangkan dalam bidang kesehatan, fasilitator mengadakan pelatiha kesehatan melalui promosi kesehatan di masyarakat dan sekolah, di masyarakat melalui majelis ta’lim dan posyandu, dan di sekolah melalui kerjasama antara fasilitator dengan pihak sekolah. Materi pelatihan meliputi lima pilar STBM, di antaranya, tidak buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, dan membuang sampah pada tempatnya.
3. Perlindungan yaitu fungsi yang berkaitan dengan tugas fasilitator sebagai konsultan. Orang yang bisa diajak berkonsultasi dalam proses pemecahan masalah. Konsultasi pemecahan masalah tidak hanya berupa pemberian dan penerimaan sarans-saran, melainkan merupakan proses yang ditunjukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pilihan-pilihan dan mengidentifikasi prosedur bagi tindakan-tindakan yang diperlukan.[[34]](#footnote-34) Dalam hal ini, fasilitator menjadi konsultan 24 jam untuk masyarakat, setiap hari berkunjung ke rumah-rumah, setiap malam mengobrol dengan masyarakat, memberi masukan terkait dengan masalah dan kendala mereka mengikuti program kesehatan dan pemberdayaan ekonomi
4. Pendukungan merupakan fungsi yang berkaitan dengan aplikasi keterampilan yang bersifat praktis yang dapat mendukung terjadinya perubahan positif pada masyarakat. Fasilitator sebagai pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi manajer perubahan yang mengorganisasi kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, berbegosiasi, berkomunikasi, dan mengatur sumber dana.[[35]](#footnote-35)

Seluruh upaya pemberdayaan digerakan oleh fasilitator, sehingga dia harus bersama-sama dengan masyarakat selama 24 jam dengan lima hari kerja. Hal demikian menuntut adanya pemenuhan dan pembiayaan kebutuhan fasilitator, oleh karena itu dana ZIS digunakan untuk *mukafa’ah* fasilitator, agar dia bisa fokus mendampingi, menarik parisipasi, dan memberdayakan masyarakat.

1. **Peningkatan Kesehatan**

Upaya HARFA dalam meningkatkan kesehatan masyarakat miskin di desa tertinggal adalah dengan cara advokasi pemilikan jamban, promosi kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan sekolah. Upaya itu dilakukan oleh fasilitator yang ditempatkan HARFA di desa-desa. Setiap desa ditempatkan satu orang fasilitator yang bertugas mendampingi mereka sejak awal sampai akhir masa pendampingan.

* + 1. **Advokasi Pembuatan Jamban**

Advokasi pembuatan jamban dilakukan dengan pendekatan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat). STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan *(trigerring).* Ada dua komponen yang sekaligus menjadi,target yang ingin dicapai dalam pendekatan STBM, *pertama,* Sanitasi total. *Kedua,* Berbasis Masyarakat.[[36]](#footnote-36)

Sanitasi total adalah kondisi suatu komunitas yang meliputi lima aspek atau yang sering dikenal dengan istilah lima pilar STBM :

* + 1. Tidak buang air besar sembarangan (BABS)
    2. Mencuci tangan pakai sabun
    3. Mengelola air minum dan makanan yang aman
    4. Mengelola sampah dengan benar
    5. Mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.

Berbasis Masyarakat adalah sebuah kegiatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, dengan indikator sebagai berikut :

1. Masyarakat terlibat secara total dalam melaksanaan kegiatan (melakukan analisa masalah dan potensi, menyusun perencanaan, menjalankan kegiatan/program, bertanggung jawab terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan, melakukan monitoring dan evalusi serta mampu melakukan pengembangan dan reflikasi kegiatan)
2. Inisiatif datang dari masyarakat
3. Pemimpin informal *(Natural Leader*) muncul dari aksi kolektif yang dilakukan oleh masyarakat dan merekalah yang akan memimpin prakarsa kolektif di masa depan.
4. Masyarakat tidak mengikuti model-model/cetak biru pembangunan yang diperkenalkan
5. Inovasi dan keberagaman model muncul dari masyarakat sendiri
6. Keputusan yang dibuat oleh masyarakat tidak bergantung pada petunjuk maupun tekanan dari luar

Sanitasi total berbasis masyarakat ditempuh dengan metode pemicuan CLTS. Pemicuan *Community Led Total Sanitation* (CLTS) adalah suatu pendekatan yang diterapkan untuk memfasilitasi masyarakat dalam memahami permasalahan dan potensi peningkatan sanitasi di komunitasnya. Prinsip-prinsip CLTS adalah sebagai berikut [[37]](#footnote-37):

1. Tanpa subsidi kepada masyarakat (tanpa pengecualian, termasuk masyarakat termiskin).
2. Tidak menggurui, tidak memaksa, tidak mempromosikan jamban.
3. Masyarakat sebagai pemimpin.
4. Masyarakat terlibat secara total dalam melakukan analisis permasalahan dan potensi, perencanaan, pelaksanaan , pemanfaatan dan pemeliharaan.

Setelah dilakukan pemicuan CLTS, Di lakukan Monev (Monitoring dan Evaluasi) CLTS di kampung-kampung yang sudah di lakukan pemicuan CLTS untuk menindak lanjuti masyarakat yang masih buang air besar sembarangan (BABS). Telah di lakukan Monev CLTS sebanyak 15 kali di kampung bahbul dan kampung Depok 2 yang sudah dipicu.

Hasil yang diperoleh setelah dilakukan monev CLTS, pada Periode Juli-Desember 2017 telah terbangun 10 jamban, dengan rincian cubluk terbangun sebanyak 1 cubluk Dan sebanyak 9 wc permanen. Seperti yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini.[[38]](#footnote-38)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Tanggal | Nama | Lokasi (RT, Kampung, SD) | Rumah | Penerima Manfaat | | | | | | Jenis Sanitasi | | |
| Dewasa | | | Anak | | | Cubluk | Leher Angsa |
| L | P | T | L | P | T |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 24/10/2017 | Alimbang | Kp,Bahbul Rt01/03 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | √ |
| 2 | 24/10/2017 | Turana | Kp,Bahbul Rt01/04 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |  | √ |
| 3 | 03/11/2017 | Yayat | Kp,Bahbul Rt01/03 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | √ |
| 4 | 03/11/2017 | Sakmah | Kp,Bahbul Rt01/03 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | √ |
| 5 | 03/11/2017 | Rakim | Kp,Depok 2 Rt,01/02 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |  | √ |
| 6 | 03/11/2017 | Tarem | Kp,Depok 2 Rt,01/02 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |  | √ |
| 7 | 03/11/2017 | Jarni | Kp,Depok 2 Rt,01/02 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | √ |
| 8 | 07/11/2017 | Sanaah | Kp,Bahbul Rt01/03 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | √ |
| 9 | 07/11/2017 | Januri | Kp,Bahbul Rt01/03 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | √ |  |
| 10 | 09/11/2017 | Jamisah | Kp,Bahbul Rt01/03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | √ |
|  | **Total** | | | **12** | **11** | **13** | **24** | **6** | **10** | **16** |  |  |

Sumber : Laporan Semester LAZ HARFA Pandeglang 2017.

Tidak berhenti di tahap monev CLTS, fasilitator terus melakukan *Home Visit* dan RTL (Rencana Tindak Lanjut) CLTS. *Home Visit* dan RTL (Rencana Tindak Lanjut) CLTS adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah Pemicuan CLTS dan Monev CLTS untuk melihat kesepakatan yang dibuat ketika pemicuan CLTS dan monev CLTS, apakah masyarkat membuat jamban atau tidak dan dipicu ulang masyarkat yang sudah membuat kesepakatan untuk membuat jamban. Agar segera meralisasikan pembuatan jambannya masing-masing.

Telah dilakukan Home Visit dan RTL CLTS sebanyak 10 kali di kampung yang difokuskan untuk didampingi yaitu Kp. Bahbul dan Kp. Depok 1 dan Depok 2 setelah dilakukan pemicuaan CLTS dan Monev CLTS, sebagai hasilnya terdapat 1 kampung yang membentuk Arisan Jamban yaitu Kp. Bahbul, sebanyak 80 orang peserta yang mengikuti arisan jamban ini. Banyak masyarakat yang telah perbaikan kualtas dari cubluk ke wc permanen[[39]](#footnote-39).

Dampak dari dibangunnya jamban di masing-masing rumah masyarakat Peningkatan Martabat Manusia *(Life With Dignity)*berikut ini:

1. Masyarkat melindungi mental anaknya dari rasa malu secara tidak sadar ketika mereka memiliki jamban dan keselamatannya terjaga pula.
2. Masyarakat sudah mulai menerapkan pola PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dengan poin tidak BABS (Buang Air Besar Sembarangan) dan cuci tangan pakai sabun.
3. Terciptanya Lingkungan yang bersih dan sehat sehingga tidak ada bau kotoran manusia serta terhindar dari berbagai penyakit seperti diare, gatal-gatal, ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) dan penyakit lainnya serta terhindar dari berbagai bahaya seperti di patuk ular, terpeleset dan gangguan asusila (dilihat dan diganggu oleh orang lain).
4. Masyarakat dapat memanfa’atkan halaman belakang rumahnya karena sudah tidak ada lagi kotoran dengan menanam sayur-sayuran terong, tomat, cabai, kangung dan lain-lain.

Advokasi jamban sesuai dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang keenam, yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Sasaran yang ingin dicapai oleh tujuan ini adalah sebagai berikut:

* + 1. pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.
    2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat sembarang, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan serta kelompok masyarakat rentan.
    3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan dumping dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi separuh proporsi air limbah yang tidak diolah, dan meningkatkan daur ulang serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.
    4. Pada tahun 2030, secara bermakna meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor dan menjamin keberlanjutan penggunaan dan pasokan air tawar untuk mengatasi kelangkaan air dan secara bermakna mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.
    5. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.
    6. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah dan danau.
    7. Pada tahun 2030, memperluas kerjasama dan dukungan internasional dalam hal pembagunan kapasitas bagi negara-negara berkembang dalam program dan kegiatan terkait air dan sanitasi, termasuk pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, daur ulang dan teknologi daur ulang.
    8. Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi.

Dari delapan target SDGs global di atas, advokasi pemilikan jamban mendukung aktualisasi target nomor dua, yakni mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat sembarang, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan serta kelompok masyarakat rentan. Dan mendukung akutalisasi target nomor delapan, yaitu Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi.

1. **Promosi Kesehatan**

Kesehatan perlu disosialisasikan dan diinternalisasikan kepada masyarakat, agar kesehatan tidak menjadi hal yang asing buat mereka, untuk merealisasikan itu, fasilitator HARFA melakukan program Promosi kesehatan yang meliputi dua jenis, yaitu promosi kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan sekolah.

* 1. **Promosi Kesehatan Masyarakat**

Promosi kesehatan masyarakat (Promkes) diadakan, karena masih banyak masyarakat desa Kertaraharja yang kurang memahami PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), cuci tangan menggunakan sabun dan tidak buang air besar sembarangan (BABS). Promkes dilaksanakan di majelis ta’lim dan posyandu, agar masyarakat bisa menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupannya sehari-hari.

Promkes sudah dilakukan di majelis ta’lim dan posyandu sebanyak lima kali dalam beberapa bulan masa pendampingan, sebagaimana dapat dilihat dalam table berikut ini[[40]](#footnote-40) :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Lokasi Promkes** | **Tanggal Pelaksanaan** | **Materi Promkes** | **Laki-laki Dewasa** | **Perempuan Dewasa** | **Laki-laki Anak** | **Perempuan Anak** | **Total** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Kp,Bahbul | 11/10/2017 | PHBS,poin jangan BAB sembarangan dan cuci tangan menggunakan sabun | 5 | 20 | 10 | 11 | 46 |
| 2 | Kp,Depok 1 | 13/10/2017 | PHBS,poin jangan BAB sembarangan dan cuci tangan menggunakan sabun | 3 | 35 | 11 | 15 | 64 |
| 3 | Kp,Depok 1 | 10/11/2017 | PHBS,poin jangan BAB sembarangan dan cuci tangan menggunakan sabun | 2 | 28 | 7 | 7 | 44 |
| 4 | Kp,Depok 1 | 11/10/2017 | PHBS,poin jangan BAB sembarangan dan cuci tangan menggunakan sabun | 1 | 21 | 22 | 12 | 13 |
| 5 | Kp,Bahbul | 11/10/2017 | PHBS,poin jangan BAB sembarangan dan cuci tangan menggunakan sabun | 1 | 24 | 25 | 12 | 12 |
| **TOTAL PENERIMA MANFAAT** | | | | **12** | **128** | **75** | **57** | **179** |

Sumber : Laporan Semester desa Kertaharja 2017

Dampak yang terjadi dengan adanya Promosi Kesehatan yaitu terjadi Peningkatan Martabat Manusia *(Life With Dignity)* antara lain:

1. Masyarakat mengetahui tentang Pentingnya cuci tangan pakai sabun melalui konsep PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)
2. Masyarakat juga terarahkan untuk membuat jamban melalui materi tentang “Pentingnya Sarana Sanitasi dan tidak BABS”
3. Masyarakat juga dapat melakukan pencegahan sebelum terkena penyakit dan penanganan sesudahnya seperti pencegahan penyakit diare dengan tidak BAB sembarangan dan penanganannya dengan banyak meminum air untuk mengembalikan cairan yang hilang.
   1. **Promosi Kesehatan Sekolah**

Promosi Kesehatan Sekoleh diadakan disebabkan karena kurangnya pemahaman siswa tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), cuci tangan menggunakan sabun, tidak buang air besar sembarangan (BABS), sehingga fasiltator mengadakan promkes di sekolah dasar dan sekolah taman kanak-kanak agar anak-anak bisa menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan kesehariannya di sekolah.

Telah dilakukan 15 kali Promkes di Sekolah SDN Kertaraharja 03. Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini[[41]](#footnote-41) :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Lokasi Promkes** | **Tanggal Pelaksanaan** | **Materi Promkes** | **Laki-laki Dewasa** | **Perempuan Dewasa** | **Laki-laki Anak** | **Perempuan Anak** | **Total** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | SDN Kertaraharja 3 Kelas 5 | Rabu 8/11/2017 | PHBS,poin jangan BAB sembarangan dan cuci tangan menggunakan sabun | 2 | 2 | 10 | 11 | 25 |
| 2 | SDN Kertaraharja 5 Kelas 6 | Jum'at 10/11/2017 | PHBS,poin jangan BAB sembarangan dan cuci tangan menggunakan sabun | 2 | 2 | 9 | 8 | 21 |
| 3 | SDN Kertaraharja 5 Kelas 6 | Rabu 22/11/2017 | PHBS,poin jangan BAB sembarangan dan cuci tangan menggunakan sabun | 2 | 2 | 20 | 22 | 46 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | SDN Kertaraharja Kelas 4 | Jum'at 24/11/2017 | PHBS,poin jangan BAB sembarangan dan cuci tangan menggunakan sabun | 2 | 2 | 6 | 5 | 15 |
| 5 | SDN Kertaraharja Kelas 3 dan 2 | Selasa 10/10/2017 | PHBS,poin jangan BAB sembarangan dan cuci tangan menggunakan sabun | 3 | 2 | 20 | 25 | 50 |
| **TOTAL PENERIMA MANFAAT** | | | | **11** | **10** | **65** | **71** | **157** |

Sumber : Laporan Semeter LAZ HARFA Pandeglang 2017

Dampak dari adanya Promkes di sekolah adalah adanya Peningkatan Martabat Manusia*(Life With Dignity)*antara lain sebagai berikut:

1. Siswa mengetahui dan menjalankan konsep PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di sekolah dan di rumahnya masing-masing.
2. Siswa dapat mempraktekkan cara Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) yang baik dan benar serta dapat melakukannya dalam aktifitas sehari-hari.
3. Siswa juga dapat menjaga Kesehatan di Lingkungannya seperti membuang sampah pada tempatnya dan tidak BAB Sembarangan.
4. Siswa juga mengetahui cara gosok gigi yang baik dan benar sehingga tidak merusak gigi dan kesehatan gigi terjaga dengan baik.

Promosi kesehatan baik kepada masyarakat ataupun anak-anak di sekolah sesuai denga tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang ketiga, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Target yang hendak dituju dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut[[42]](#footnote-42) :

* + - 1. pada tahun 2030, mengurangi angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.
      2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 kelahiran hidup (KH) dan angka kematian balita 25 per 1000.
      3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemic AIDS, tuberculosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber dari air dan penyakit menular lainnya.
      4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.
      5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alcohol yang membahayakan.
      6. Pada tahun 2020, mengurangi separuh kematian global dan cedera dari kecelakaan jalan lalu lintas.
      7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.
      8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan resiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.
      9. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kesehatan dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.

Promosi kesehatan, baik di lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah mendukung aktualisasi target nomor tiga, yaitu mengakhiri epidemic AIDS, tuberculosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber dari air dan penyakit menular lainnya. Dan target nomor Sembilan, yaitu Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kesehatan dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.

**D. Pemberdayaan Ekonomi**

Pemberdayaan secara konseptual menurut Fredian pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.[[43]](#footnote-43)

Pemberdayaan menurut pandangan Suharto menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam *(a)* memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan. *(b)* menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan dan *(c)* berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka[[44]](#footnote-44)

Menurut Ife seperti yang dikutip Suharto, pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas :

* Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam mengambil keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
* Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
* Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas tanpa tekanan.
* Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan.
* Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
* Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
* Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi. [[45]](#footnote-45)

Berdasarkan paparan pemberdayaan di atas, konsep pemberdayaan Ferdian masih cenderung general, tidak menyebutkan secara spesifik indikator pencapaian dari upaya pemberdayaan masyarakat. Sementara konsep pemberdayaan Ife cenderung cocok untuk masyarakat yang tinggal di lingkungan yang sudah urban, maju dan modern. Sedangkan konsep pemberdayaan Suharto menyebutkan indikator pemberdayaan masyarakat secara lebih spesifik, dan peruntukannya sesuai dengan kondisi masyarakat desa tertinggal.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa Kertaraharja dilakukan dengan tiga cara, dua di antaranya untuk mendatangkan profit dan tambahan penghasilan masyarakat Kertaraharja, yaitu pembentukan koperasi keuangan mikro berbasis perempuan (KKMBP), dan pembentukan kelompok ternak domba, sedangkan yang ketiga untuk melakukan penghematan dengan cara pemanfaatan lahan kosong di sekitar rumah. Sebetulnya HARFA memiliki lembaga HARFA *Skill Center* (Pusat Pengembangan Keterampilan HARFA), tetapi lembaga ini masih beroperasi di Daerah Serang, belum menyentuh daerah Pandeglang**.**

1. **Koperasi Keuangan Mikro Berbasis Perempuan (KKMBP)**

Koperasi adalah organisasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang atau kelompok demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan[[46]](#footnote-46). Di Indonesia koperasi dijalankan dengan dua sistem, yaitu sistem konvensional yang menggunakan prinsip bunga (riba) dan sistem syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil. Koperasi Keuangan Mikro Berbasis Perempuan (KKMBP) dikelola dengan menggunakan sistem syariah[[47]](#footnote-47).

Koperasi Keuangan Mikro Berbasis Perempuan (KKM-BP) merupakan koperasi yang mendayagunakan perempuan, disebut demikian, karena seluruh pengurus dan anggota koperasi tersebut terdiri dari para perempuan.

Mekanisme pengelolaan Koperasi Keuangan Mikro Berbasis Perempuan (KKM-BP) dilakukan dengan cara sebagai berikut[[48]](#footnote-48) :

1. Keanggotaan terbuka dan sukarela.
2. Pengelolaan koperasi dilakukan secara terbuka atau transparan.
3. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) sesuai dengan kontribusi dan transaksi anggota kepada koperasi.
4. Pendidikan anggota dilakukan terus menerus.
5. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (*istiqomah*).
6. Mengedepankan kejujuran, amanah, kerjasama dan kekeluargaan.

Tujuan yang hendak dicapai Koperasi Keuangan Mkro Berbasis Perempuan (KKMBP) adalah sebagai berikut[[49]](#footnote-49) :

1. Meningkatkan pendapatan keluarga
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa
3. Sarana edukasi masyarakat (perempuan) untuk berperan aktif dalam kegiatan pemberdayaan melalui pembinaan usaha mikro produktif.

Proses pembentukan awal kelompok KKM-BP[[50]](#footnote-50):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Survey Potensi** | **Survey Wilayah** | **Analisa SDM Calon Anggota/Mitra** |
| **1** | **2** | **3** |
| * Melihat kondisi sosial ekonomi * Potensi /prosfek usaha   Kualitas SDM | * Menentukan wilayah penerima program * Membuat sketsa situasi domisili (per RT, Perrumah dan lain-lain) | * Mencari tahu latar belakang keluarga * Nama baik di masyarakat * Hubungan dengan lembaga keuangan lain * Usaha sebelumnya |

Setelah dibentuk, lalu diadakan latihan wajib mitra[[51]](#footnote-51).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fungsi LWM** | **Hal penting dalam LWM** | **Tahapan kegiatan LWM** |
| 1 | 2 | 3 |
| * Menumbuhkan rasa kebersamaan antar anggota * Memberikan gamba- ran dan pemahaman yang jelas tentang pengajuan dan peng- embalian pembiayaan * Mempersiapkan ang- gota kelompok agar mengerti peran dan tanggungjawab seba- gai anggota/mitra | * Dilaksanakan selama 2 hari (setiap hari hanya 1 jam) * Sifatnya wajib bagi calon anggota baru * Moment tepat untuk Penjelasan sistem KKM-BP * Sarana menguji keseriusan calon anggota * Bersifat nonformal * Kesepakatan jadwal pertemuan * Pembacaan ikrar | * Hari ke-1: * Perkenalan * memotivasi calon anggota * Penjelasan System KKM-BP (apa itu simpanan wajib, pokok, sukarela dan laba) * Membuat kesepakatan jumlah simpanan wajib, pokok dan laba |
| * Hari ke-dua: * Cara pengajuan, penjelasan form pengajuan pinjaman * Pencairan pinjaman * Pembuatan pembukuan/pencatatan transaksi |

Kelompok Koperasi Keuangan Mikro Berbasis Perempuan atau KKM-BP berhasil dibentuk di desa Kertaraharja, koperasi tersebut dinamai kelompok KKMBP Delima, usia koperasi saat ini menginjak tahun ketiga, dan beranggotakan 27 orang perempuan, masing-masing anggota berkewajiban menyetorkan iuran wajib sebesar Rp. 25,000,00. Pada awal pembentukan koperasi ini, HARFA memberikan subsidi sebesar Rp. 6,000,000.00 sebagai modal dasar selain dari iuran wajib para anggota. Setelah dikelola aset koperasi tersebut saat ini mencapai Rp. 18,500,000.00.[[52]](#footnote-52)

Pembentukan KKMBP di desa Kertaraharja menghantarkan para perempuan agar mereka mampu menjangkau sumber produktif yang dapat meningkatkan pendapatannya dan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka terbebas dari kelaparan, kebodohan dan kesakitan, sejalan dengan indikator pertama dan kedua dari konsep pemberdayaan Suharto.

Manajemen koperasi ini dikelola langsung oleh masyarakat perempuan, sehingga mereka mampu membuat keputusan sendiri untuk mengembangkan koperasinya, hal ini sesuai dengan indikator pemberdayaan Suharto yang ketiga. Koperasi tersebut sangat membantu anggota maupun nasabah dari luar anggota untuk membiayai usaha mikro yang mereka miliki. Hingga saat ini proses simpan pinjam terus berjalan dengan lancar. Anggota dapat merasakan manfaat dari program, dan dengan adanya program KKMBP anggota Rajin Menabung / menyisihkan uang .

Dampak dari adanya program KKMBP adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Martabat Manusia *(Life With Dignity*): Mayarakat perempuan lebih percaya diri karena saat ini mereka memiliki tabungan di KKMBP dan apabila membutuhkan modal atau dana untuk keperluan yang mendesak, mereka bisa meminjamnya di KKMBP
2. Perdamaian dan Keadilan dalam Masyarakat *(Just and Peaceful Relationship) :* Anggota KKMBP juga memperoleh keuntungan dengan bergabung ke dalam KKMBP karena marginnya akan dibagikan kembali pada anggota KKMBP sama seperti halnya sistem koperasi.
3. Peningkatan ekonomi masyarakat *(Sustained Economic Wellbeing****)* :** Masyarakat dapat mengembangkan usahanya melalui modal yang dipinjamkan pada anggota dan nasabah KKMBP. Anggota KKMBP mendapatkan SHU setiap tahunnya sebesar Rp. 200,000,00. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah, karena tidak sedikit nasabah yang meminjam untuk mengembangkan usahanya. Di samping itu, anggota KKMBP dapat terhindar dari pinjaman bank, bank keliling, dan rentenir yang bunganya relatif tinggi (rata-rata diatas 20%).

Pembentukan Koperasi KKMBP sesuai dengan tujuan SDGs *(Sustainable Depelovement Goals)* UNDP kelima, yakni mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Tujuan ini memiliki maksud untuk meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan untuk mengembangkan bakat dan potensinya sehingga memiliki kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki.[[53]](#footnote-53)

Sasaran yang akan dicapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut[[54]](#footnote-54) :

* + 1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di manapun.
    2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.
    3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan pernikahan dini dan paksa, serta sunat perempuan.
    4. Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan public, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggungjawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.
    5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat.
    6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual, reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *programme of action of the international conference on population and development and the Beijing platform* serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi-konferensi tersebut.
    7. Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan control atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.
    8. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.
    9. Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesejahteraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di setiap tingkatan.

Dari Sembilan target SDGs di atas, pengadaan KKMBP mendukung perwujudan target kelima, yaitu Menjamin partisipasi penuh dan efektif dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan ekonomi dan masyarakat. Mendukung target ketujuh, yaitu Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan control atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional. Dan target kesembilan, yaitu Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesejahteraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di setiap tingkatan.

1. **Ternak Domba**

Program ternak domba secara bergulir diberikan kepada 10 (sepuluh) orang kaum dhuafa (rentan) di kampung Depok 2 dan Pamatang Nangka. Program tersebut sudah berjalan selama dua tahun dan telah dilakukan bagi hasil kelompok pada tanggal 20 september 2017 sesuai dengan akad awal yang telah disepakati, kelompok Mekar Jaya 1 dan 3 mendapatkan bagian sebanyak 24 ekor domba dan harfa mendapatkan 5 ekor domba ditambah dengan domba yang telah dititipkan kepada kelompok sebanyak 11 ekor, mati 3 ekor, sisa 9 ekor, kemudian hasil dari bagi hasil dengan kelompok ternak domba Mekar Jaya 1 dan 3 digulirkan kepada kampung tetangga sebanyak 13 ekor domba yaitu Kampung Bahbul[[55]](#footnote-55)

Dampak yang terjadi pada anggota Kelompok ternak Domba adalah adanya peningkatan ekonomi masyarakat *(Sustained Economic Wellbeing)*, antara lain :

1. Anggota kelompok ternak domba mengalami peningkatan pendapatan, hal tersebut dapat diketahui dari total pendapatan sebelum dan sesudah program. Agar lebih jelas, dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Alamat** | **Pekerjaan** | **Pendapatan perbulan sebelum program** | **Pendapatan perbulan Setelah program** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Suradi | Depok 2 | Tani | Rp. 400,000 | Rp. 800.000 |
| 2 | Daman | Depok 2 | Tani | Rp. 550,000 | Rp. 850.000 |
| 3 | Marji | Depok 2 | Tani | Rp. 400,000 | Rp. 1,000,000 |
| 4 | Rasna | Depok 2 | Tani | Rp. 500,000 | Rp. 1,000,000. |
| 5 | Misna | Depok 2 | Tani | Rp. 450,000 | Rp. 900,000. |

Sumber : Laporan Semester LAZ HARFA Pandeglang 2017

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Alamat** | **Pekerjaan** | **Pendapatan perbulan sebelum program** | **Pendapatan perbulan Setelah program** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Kariman | Kp. Pamatang Nangka | Tani | Rp. 400,000 | Rp. 750.000 |
| 2 | Mista | Kp. Pamatang Nangka | Tani | Rp. 550,000 | Rp. 750.000 |
| 3 | Andi | Kp. Pamatang Nangka | Tani | Rp. 400,000 | Rp. 600,000 |
| 4 | Salim | Kp. Pamatang Nangka | Tani | Rp. 500,000 | Rp. 750,000. |

Sumber: Laporan Semester LAZ HARFA Pandeglang 2017

1. Anggota kelompok Ternak Domba memiliki kegiatan yang bermanfaat untuk “tabungan” jangka panjang, selain bertani, mereka juga memelihara domba untuk kebutuhan kedepan seperti biaya sekolah anak-anak dan biaya berobat jika sedang dibutuhkan
2. Kotoran ternak domba juga dimanfaatkan oleh anggota Kelompok Ternak Domba untuk dibuat pupuk organik, baik padat (kompos) maupun cair (MOL) untuk digunakan di lahannya masing-masing.
3. Anggota Kelompok Ternak Domba juga memperoleh pendapatan secara berkala kedepannya dengan memelihara ternak domba, juga kotoran dombanya dapat dijual untuk menambah kebutuhan sehari-hari

Pemberdayaan ekonomi melalui pembentukan kelompok ternak domba sesuai dengan tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* kedelapan, yaitu meningkatkan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Target yang akan dicapai dari tujuan ini adalah[[56]](#footnote-56) :

1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai kondisi nasional dan khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.
2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.
3. Menggalakan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.
4. Meningkatkan secara progressif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan sesuai dengan *the 10-frame work of programs on sustainable consumption and production*, dengan negara-negara maju sebagai pengarah.
5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
6. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.
7. Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.
8. Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khusunya pekerja migran perempuan dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.
9. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.
10. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.

Pengadaan kelompok ternak domba mendukung reaisasi target yang pertama, yaitu mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai kondisi nasional dan khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.

1. **Pemanfaatan Pekarangan dan Kebun Masyarakat**

Banyak lahan pekarangan di depan rumah masyarakat yang masih kosong sehingga lahan tersebut menjadi tidak produktif dan banyak ditumbuhi rumput liar yang tidak bisa dikonsumsi oleh masyarakat, kondisi seperti ini disebut sebagai degradasi lahan, maka diberikanlah program pemanfaatan lahan pekarangan dan kebun masyarakat berupa tanaman sayuran seperti cabai, tomat, kangkung, sesim, timun suri, terong dan polybag untuk media tanam[[57]](#footnote-57).

Sudah 4 bulan program berjalan dan masyartakat sudah dapat menikmati hasil panen dari tanaman-tanaman sayuran yang ditanam seperti cabai, tomat, kangkung, sesim, timun sari, terung dan lainnya tanpa harus membeli ke pasar..

Dampak yang terjadi dengan adanya Pemanfaatan Pekarangan dan Kebun Masyarakat yaitu :

1. Masyarakat tidak harus membuang waktunya untuk pergi ke pasar hanya untuk berbelanja sayuran. Waktu yang biasa digunakan untuk ke pasar, bisa digunakan untuk hal-hal yang produktif.
2. Masyarakat tidak perlu membeli untuk kebutuhan sayur-mayur di rumah, sehingga dapat menghemat keuangan keluarga bahkan hasil panen sayur dari pekarangan atau kebun tersebut dapat dijual kembali ke lingkungan masyarakat sekitar.
3. Dengan menanam tanaman sayuran, kualitas sayuran juga lebih terjamin dan menyehatkan, karena untuk memupukan dan penyemprotan memakai pupuk organik padat (kompos) maupun cair (MOL/Mikro Organisme Lokal) terbebas dari pupuk kimia sintesis.
4. Ibu-ibu di rumah lebih produktif, karena memiliki kegiatan mengelola tanaman di rumahnya dan masyarakat mengetahui cara membuat kompos dan MOL.

Pemanfaatan pekarangan rumah dan kebun masyarakat sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) yang kelima belas, yaitu melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Dalam konteks ini, pemanfaatan halaman pekarangan rumah memperbaiki penggunaan lahan yang sudah mengalami degradasi.

1. . Wawancara dengan Mulyadi, Ketua Yayasan HARFA Pada Tanggal 27 November 2017 [↑](#footnote-ref-1)
2. . *Wawancara dengan Mulyadi* [↑](#footnote-ref-2)
3. . Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 *tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*. *P*. 81. [↑](#footnote-ref-3)
4. . *Wawancara dengan Mulyadi.* [↑](#footnote-ref-4)
5. . . *Wawancara dengan Mulyadi.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *. Wawancara dengan Mulyadi.*  [↑](#footnote-ref-6)
7. *. Wawancara dengan Mulyadi.*  [↑](#footnote-ref-7)
8. . Undang-Undang Republi Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.. [↑](#footnote-ref-8)
9. . *Wawancara dengan Mulyadi.*  [↑](#footnote-ref-9)
10. . Dokumen Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa [↑](#footnote-ref-10)
11. . Brosur Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa [↑](#footnote-ref-11)
12. . *Undang-Undang Zakat.*  [↑](#footnote-ref-12)
13. . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat* [↑](#footnote-ref-13)
14. . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 [↑](#footnote-ref-14)
15. . *Ibid* [↑](#footnote-ref-15)
16. . Wawancara dengan Fadlullah, Sekretaris Yayasan LAZ HARFA, pada tanggal 26 November 2017. [↑](#footnote-ref-16)
17. . Dokumen LAZ HARFA 2017 [↑](#footnote-ref-17)
18. . *Brosur LAZ HARFA* [↑](#footnote-ref-18)
19. . Wawancara dengan Imam Hidayat, Koordinator Lapangan HARFA pada tanggal 21 Novemper 2017 [↑](#footnote-ref-19)
20. . Dokumen Laporan Semester, Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa Cabang Pandeglang, September 2017 [↑](#footnote-ref-20)
21. . Dokumen Laporan Semester [↑](#footnote-ref-21)
22. . Dokumen Laporan Semester [↑](#footnote-ref-22)
23. *.* Dokumen Laporan Semester [↑](#footnote-ref-23)
24. *.* Dokumen Laporan Semester [↑](#footnote-ref-24)
25. Dokumen Laporan Semester [↑](#footnote-ref-25)
26. . Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. (Bandung: PT Refika Aditama. Cet. 5. 2014). *P*. 98 [↑](#footnote-ref-26)
27. . Wawancara dengan Imam Hidayat*..* [↑](#footnote-ref-27)
28. . Fredian Tonny Nasdian. *Pengembangan Masyarakat*. *P.* 62 [↑](#footnote-ref-28)
29. . Fredian Tonny Nasdian. *Pengembangan Masyarakat.* *P*. 64 [↑](#footnote-ref-29)
30. . Wawancara Imam Hidayat . [↑](#footnote-ref-30)
31. . Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. *P*. 96 [↑](#footnote-ref-31)
32. . Suharto. *Op.Cit*. hal. 96 [↑](#footnote-ref-32)
33. . Suharto. *Op.Cit*. hal. 96 [↑](#footnote-ref-33)
34. . Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. *P.* 96-97 [↑](#footnote-ref-34)
35. . Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. *P.* 97 [↑](#footnote-ref-35)
36. . Materi yang disampaikan dalam acara pembinaan kader-kader Dompet Dhuafa yang diadakan pada tanggal 27 November 2017. [↑](#footnote-ref-36)
37. . *Wawancara dengan Imam Hidayat* *Op.Cit.* [↑](#footnote-ref-37)
38. . *Laporan Semester LAZ HARFA*  [↑](#footnote-ref-38)
39. . *Dokumen laporan Semester 2017.* [↑](#footnote-ref-39)
40. . *Laporan Semester 2017.* [↑](#footnote-ref-40)
41. . *Laporan Semester 2017.* [↑](#footnote-ref-41)
42. . Badan Pusat Statistik. *Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Depelovement Goals) di Indonesia. P*. 43 [↑](#footnote-ref-42)
43. . Fredian Tonny Nasdian. *Pengembangan Masyarakat*. *P*. 62 [↑](#footnote-ref-43)
44. . Edi Suharto*. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial.*  [↑](#footnote-ref-44)
45. Edi Suharto*. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial.*  [↑](#footnote-ref-45)
46. . Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang *Koperasi Indonesia* [↑](#footnote-ref-46)
47. . *Wawancara Imam Hidayat.* [↑](#footnote-ref-47)
48. . *Wawancara Imam Hidayat.*  [↑](#footnote-ref-48)
49. . *Wawancara Imam Hidayat.* [↑](#footnote-ref-49)
50. . Materi yang Disampaikan Pada Acara Pelatihan Kerjasama LAZ Harfa dengan Dompet Dhuafa tahun 2017 [↑](#footnote-ref-50)
51. . *Materi Pelatihan LAZ HARFA* [↑](#footnote-ref-51)
52. . Wawancara dengan Supriadi,, Fasilitator desa Kertaraharja pada Tanggal 25 November 2017. [↑](#footnote-ref-52)
53. *Badan Pusat Statistik*. *P.* 79 [↑](#footnote-ref-53)
54. *Badan Pusat Statistik.* *P.* 79 [↑](#footnote-ref-54)
55. *Laporan Semeseter 2017.* [↑](#footnote-ref-55)
56. . *Badan Pusat Statistik*. *P.*119. [↑](#footnote-ref-56)
57. . *Laporan Semester 2017.* [↑](#footnote-ref-57)